

# IMPLEMENTASI PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* DENGAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh :

Rizky Adrian, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

## ABSTRACT

*E-Procurement is a process of procuring goods / services that are implemented using information technology according to statutory provisions. E-Procurement emerged as the answer to the case of corruption in the implementation of procuring goods and services in Indonesia. The existence of E-Procurement become an interesting phenomenon because the implementation is different from conventional procurement. E-Procurement are expected to answer the expectations of society in order to create a process for of procurement of goods and services that are accountable, transparent, effective and efficient.*

*Based on the regulation No. 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions which explains that utilization of information technology was instrumental in trade and growth in the national economy for the welfare of the community, the Department of Highways of Central Java Province implementing E-Procurement since 2009. In its implementation, it was found some problems and obstacles. The problems that arise such as denial and resistance where the service provider are more comfortable to conventional procuring process.*

**Keywords:** *E-Procurement, Information Technology, Resistance and accountability*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laju arus globalisasi yang semakin deras membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal. Perkembangan tersebut menuntut bentuk pemerintahan yang dapat diandalkan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan dinamis. Berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai penelitian dan pengamatan, mutu pelayanan publik tidak sesuai harapan. Terdapat banyak kekurangan dari bentuk pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah. Kelemahan penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya menyangkut prosedur dan mekanisme pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, dan tidak bisa memberikan kepastian hukum. Hal ini diperparah dengan masih diketemukannya berbagai bentuk pungutan liar.

Kemajuan teknologi informasi dianggap sebagai salah satu jalan keluar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dari pemerintah. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai salah satu upaya untuk

menciptakan pelayanan yang prima. Hal ini disebabkan potensi teknologi informasi modern membuka peluang perwujudan pelayanan prima, meningkatkan pendayagunaan serta pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berlomba-lomba mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi diberbagai aspek kegiatan pemerintahan. Salah satunya adalah *Electronic Procurement (E-Procurement)* yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara yang menggunakan teknologi informasi.

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menerapkan penggunaan E-Procurement sejak tahun 2009. Penerapan E-Procurement didasari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yang berdampak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pada awalnya penyelenggaraan *E-Procurement* pada Dinas Bina Marga bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran karena adanya tuntutan reformasi dari publik. Hingga saat ini *E-Procurement* berkembang menjadi kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memperlancar dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan akses transportasi. Dengan proses pengadaan yang cepat maka semakin cepat pula pekerjaan dapat diselesaikan. Jika proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, semakin cepat pula manfaat dari infrastruktur transportasi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam periode beberapa tahun pelaksanaan E-Procurement, ditemukan beberapa

permasalahan dalam prosesnya. Terlihat dari praktek yang dilaksanakan belum bergerak sejalan dengan konsep yang diinginkan. Baik dari teknologi, pengelolaan SDM, juga timbulnya resistensi yang mengakibatkan minimnya partisipasi.

Pertama, adanya kendala di bidang teknologi. Dapat dilihat dari akses internet yang belum tersebar secara menyeluruh ke semua daerah. Ditemukan pula ketidakmampuan penggunaan fitur-fitur *E-Procurement* yang ada baik pihak panitia maupun pengguna. Ketidakmampuan ini kemudian menimbulkan masalah baru yaitu tidak transparannya pelaksanaan *E-Procurement*. Berdasarkan persoalan tersebut timbulnya sikap resistensi dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya *E-Procurement*. Fenomena yang terjadi dimana terdapat instansi dan penyedia jasa yang lebih nyaman dengan sistem pengadaan konvensional. Permasalahan berikutnya adalah dalam aspek partisipasi. Dalam pelaksanaan E-Procurement, belum terwujudnya partisipasi dari masyarakat seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan *E-Procurement* yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kedua alasan inilah, peneliti mengambil judul **“Implementasi Pelaksanaan E-Procurement dengan Prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah”**. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

## B. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi *E-Procurement* dengan berdasarkan prinsip *Good Governance* yang dilaksanakan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

## C. Kerangka Teori

### C.1. Prinsip-Prinsip Good Governance

Tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Dengan demikian maka *Good governance* diartikan sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggung jawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata

kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Prinsip utama *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Untuk terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional, serta ketetalaksanaan yang responsife dan adaptif. Sehingga demikian koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan yang sinergi dan optimal.

Kunci utama memahami *Good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *Good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

#### 1) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

#### 2) Responsivitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat mampu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Responsivitas sebagai salah satu

indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

### 3) **Partisipasi masyarakat**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### 4) **Efektifitas dan Efisiensi**

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

## **C.2. Teori Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Proses kebijakan adalah proses yang berkesinambungan. Proses tersebut berawal dari pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahapan penting dalam proses kebijakan adalah implementasi kebijakan. Pada analisis implementasi kebijakan hendaknya melihat variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam A.G Subarsono, 2005; 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

#### 1) **Karakteristik Masalah :**

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan dan di sisi

lain terdapat masalah yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota sasaran terhadap program relatif berbeda.

#### 2) **Karakteristik Kebijakan (Variabel Intervening )**

- a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

#### 3) **Lingkungan Kebijakan ( Variabel Dependen )**

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan

tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

- b. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

#### **D. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (*interview guide*), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Lokus penelitian berada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; GAPENSI Kota Semarang; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Peneliti mengumpulkan data menggunakan panduan wawancara dan software *recorder* yang terdapat pada *Handphone* sebagai alat bantu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari catatan, buku, dokumen, dan sumber lain. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

## **PEMBAHASAN**

### **A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT**

Dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang prima, Dinas Bina Marga senantiasa berupaya agar *E-procurement* dapat berjalan dengan optimal. Pelaksanaan *E-Procurement* yang prima dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya mampu memenuhi prinsip-prinsip dari *Good Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain Akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dapat diketahui kondisi perwujudan prinsip-prinsip *E-Procurement* di Dinas Bina Marga, antara lain:

#### **A.1 Akuntabilitas *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan pelaksanaan *E-Procurement* untuk menciptakan proses pengadaan yang akuntabel di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah telah tercapai. Pelaksanaan yang dilakukan sesuai tujuan *E-Procurement* pada Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa *E-Procurement* dilaksanakan untuk peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Adanya sistem dengan tingkat akuntabilitas yang baik, memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan evaluasi yang dilakukan. Permasalahan yang ditemukan dalam perwujudan akuntabilitas yang baik adalah kurangnya koordinasi dari masing-masing dinas, terkait pertanggungjawaban yang diberikan. Permasalahan ini mengakibatkan ketidakjelasan informasi yang diperoleh para peserta tender disebabkan perbedaan persepsi tersebut.

## **A. 2 Responsivitas *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.**

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah melakukan *E-Procurement* didasari atas keinginan publik yang ingin mewujudkan proses pengadaan yang akuntabel dan transparan serta bebas KKN. Dinas Bina Marga berupaya memenuhi segala kebutuhan agar pelaksanaan *E-Procurement* dapat berjalan dengan optimal seperti penyediaan sarana-prasarana bagi pelaksana agar mampu bekerja optimal. Dinas Bina Marga juga menyediakan wadah khusus bagi masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi. Dengan Dinas Bina Marga melaksanakan *E-Procurement* merupakan upaya meningkatkan taraf kualitas sarana dan prasarana khususnya dibidang transportasi dan akses publik bagi masyarakat dalam bentuk jalan dan jembatan.

## **A. 3 Partisipasi *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Dalam pelaksanaan *E-Procurement*, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak LPSE Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. LPSE menyediakan wadah khusus bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan *E-Procurement*. LPSE memfasilitasi masyarakat agar dapat turut serta mengawasi pendanaan dari proyek yang dilaksanakan dengan menyertakan rincian dana proyek dengan jelas. Dinas juga menyediakan kolom khusus dan kotak saran bagi masyarakat untuk memberikan pertanyaan maupun aspirasi terkait *E-Procurement*. Dengan penerapan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, terjadi peningkatan peserta pengadaan. Peningkatan tersebut terjadi karena dengan *E-Procurement*

proses yang dilakukan lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

## **A. 4 Efisiensi Implementasi *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Penerapan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran. Dengan penggunaan sarana elektronik seperti saat ini, Dinas Bina Marga bisa menghemat anggaran yang selama ini alokasikan untuk sosialisasi pengadaan konvensional. Penyediaan berbagai macam keperluan seperti tempat, makanan, file lelang dan lain-lain pada saat melaksanakan proses Pengadaan, sudah tidak diperlukan lagi sehingga pendanaan yang tersedia dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Sebelumnya Dinas harus membagikan seluruh file kepada semua peserta, tanpa boleh mengutip biaya sedikitpun jadi murni diambil dari anggaran. Setiap tahun Dinas Bina Marga harus menyiapkan anggaran bisa sampai dua ratus juta Rupiah. Selain memperoleh efisiensi anggaran, *E-Procurement* juga menghasilkan efisiensi waktu. Dengan *E-Procurement* panitia pengadaan tidak perlu bekerja diluar jam kerja karena proses kerjanya yang lebih simple dan efisien. Operasionalisasinya juga dapat diakses dengan mudah karena memanfaatkan teknologi komputer.

## **A.5 Efektifitas Implementasi *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Efektifitas merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan *E-Procurement*. Dengan pelaksanaan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga terciptalah suatu proses pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, transparan dan efisien dari sebelumnya. Baik dari segi anggaran maupun proses kerja dibandingkan sistem pengadaan dengan cara konvensional. Dengan tingkat keberhasilan dan keefektifan yang baik ini

mengakibatkan tingginya minat terhadap *E-Procurement*.

Dari informasi yang di dapat diketahui bahwa pelaksanaan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat efektifitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan *E-Procurement* menciptakan suatu proses Pengadaan yang cepat, sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan optimal. Terjadinya peningkatan efektifitas dalam pengadaan melalui *E-Procurement* karena prosesnya memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat menghemat waktu serta biaya untuk prosesnya. Para peserta pengadaan dapat ikut serta dalam *E-Procurement* cukup dengan mengakses website yang tersedia, tanpa harus menghadiri pengadaan yang dilaksanakan.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN E-PROCUREMENT**

Dalam perwujudan *E-Procurement* yang prima di Dinas Bina Marga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, berdasarkan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier faktor-faktor tersebut antara lain faktor keragaman perilaku, faktor kesulitan teknis, faktor kejelasan dan konsistensi tujuan, faktor ketepatan alokasi sumber daya, faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat, faktor komitmen dan keterampilan implementor

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dapat diketahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga, antara lain:

### **B.1 Faktor Keragaman perilaku**

Keragaman perilaku dari kelompok sasaran memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada saat dilakukannya sosialisasi. Hal ini disebabkan kemajemukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan proses sosialisasi yang

dilakukan secara berkelanjutan oleh LPSE Dinas Perhubungan kemudian menghasilkan pemahaman yang sama bagi semua pihak. Sosialisasi yang dilakukan antara lain berbentuk seminar dan pelatihan peningkatan *softskill*. Pada tingkat Nasional, dilakukan sosialisasi melalui media massa seperti televisi dan media cetak. Dengan proses sosialisasi yang dilakukan, kelompok sasaran kebijakan memperoleh pengetahuan lebih lanjut terkait kebijakan *E-Procurement* yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat keragaman yang tadinya menjadi penghambat kemudian dapat diatasi sehingga tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan *E-Procurement*

### **B.2 Faktor Kesulitan Teknis**

Kesulitan teknis memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Kesulitan teknis tersebut antara lain sarana-prasarana dan kondisi intern organisasi. Dalam pelaksanaan *E-Procurement*, Dinas Bina Marga memiliki kondisi intern organisasi yang kondusif. Masing-masing panitia mampu menyelesaikan aspek pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Telah terbentuk komunikasi yang baik serta sikap profesionalitas dari para panitia yang bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak ditemukan lagi perbedaan pemahanan dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi *turnover*. Dalam aspek sarana prasarana yang tersedia, terdapat masalah yaitu kendala terkait koneksifitas internet yang tersedia. *Bandwidth* yang tersedia masih sangat terbatas sehingga memerlukan jaringan internet yang lebih baik demi menopang pelaksanaan *E-Procurement*. Masalah konektifitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan *E-Procurement*, karena proses pengadaan dari *E-Procurement* menggunakan fitur *online*. Pendaftaran, pengelolaan data sampai pengumumannya dilakukan melalui media internet. Contohnya pada saat melakukan *upload*

atau *download* data yang berisikan file Pengadaan.

### **B.3 Faktor Kejelasan dan Konsistensi Tujuan**

Dinas Bina Marga telah ditanamkan pemahaman mengenai pelaksanaan *E-Procurement* bagi para jajarannya. Dapat dilihat dari telah terciptanya kesamaan visi misi dari *E-Procurement*. Dinas Bina Marga melakukan sosialisasi intern dalam bentuk pengumuman yang sederhana yaitu menggunakan media informasi konvensional seperti papan pengumuman. Seiring perkembangan teknologi, penyebaran informasinya ditunjang dengan sosialisasi dalam bentuk efektif melalui *Website* yang disediakan. Jika melihat aspek konsistensi, Dinas Bina Marga senantiasa melakukan berbagai macam cara untuk mencegah timbulnya suatu masalah yang akan mengganggu proses dari pelaksanaan *E-Procurement*. Seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu senantiasa melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada para pelaksana kebijakannya agar tercipta bentuk pemahaman serta tujuan yang sama. Jadi faktor kejelasan dan konsistensi tujuan dalam pelaksanaan *E-procurement* di Dinas Bina Marga tidak menjadi masalah berarti karena telah berjalan sebagaimana mestinya.

### **B.4 Faktor Ketepatan Alokasi Sumber Daya**

Dinas Bina Marga senantiasa berupaya menciptakan pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya yang dimiliki. Baik SDM maupun sumber daya finansial. Pengelolaan SDM dimulai dari proses rekrutmen dan penempatan dalam pelaksanaan *E-Procurement*. Dinas Bina Marga menetapkan berbagai ketentuan dalam proses *recruitment* agar kondisi tersebut tidak terjadi kembali. Penetapan dan pengelolaan SDM dilakukan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kepala Dinas..

Untuk aspek sumber daya dinansial dalam pelaksanaan *E-Procurement* sepenuhnya didapat dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalannya kebijakan tersebut. Pengelolaan sumberdana sepenuhnya dilakukan oleh kepanitiaan dengan bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas. Apabila prosposal tender yang diajukan oleh pemenang memiliki nilai lebih rendah dari anggaran yang dipersiapkan pemerintah, sisa dana akan dikembalikan ke APBD Jawa Tengah sepenuhnya tanpa adanya pengalihan atau pengurangan dalam hal apapun dan bentuk apapun.

### **B.5 Faktor Kondisi Sosial-ekonomi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa terdapat gap yang sangat besar antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Gap tersebut kemudian menyebabkan penyebaran informasi kedaerah pedesaan tidak dapat berjalan semaksimal didaerah perkotaan. Terkendalaya penyebaran informasi ke daerah pedesaan disebabkan sarana prasarana yang tidak memadai (permasalahan eksternal).

Berdasarkan pandangan dari pihak swasta, pelaksanaan *E-Procurement* memberikan dampak besar pada pengusaha. Dengan perubahan mekanisme pengadaan konvensional menjadi *E-Procurement* mengakibatkan mulai tersisihnya para pengusaha kelas menengah kebawah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *E-Procurement* membutuhkan kualifikasi yang tinggi seperti sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakannya. Agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal juga diperlukannya tenaga para ahli yang bertugas mengelola sarana-prasarana yang ada. Hal seperti ini tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pengusaha besar yang telah memiliki sarana prasarana serta para staf ahli yang berkualitas, namun berbeda dengan pengusaha kelas bawah.

Kesimpulan untuk faktor kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat dapat dikatakan masih ada sedikit masalah dan kemudian menjadi hambatan dalam pelaksanaan E-Procurement.

## **B.6 Faktor Komitmen dan Keterampilan Implementator**

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, dalam pelaksanaan *E-Procurement* bentuk komitmen yang diberikan oleh pemerintah berupa regulasi atau peraturan-peraturan Nasional terkait pelaksanaan. Adapun peraturan tersebut antara lain Undang-Undang, instruksi maupun peraturan dari Presiden yang dibuat oleh pusat dalam bentuk instruksi kepada daerah untuk dilaksanakan. Peraturan yang dikeluarkan tersebut ditujukan untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Kembali lagi, yang paling penting adalah komitmen dari dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kebijakan. Komitmen dari pelaksana, dapat diketahui dari berbagai cara dan upaya dinas dan para implementator kebijakannya yang senantiasa berusaha untuk mempersiapkan segala macam sarana dan prasarana agar pelaksanaan *E-Procurement* dapat berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan hasil analisis yang dilakukan, kesimpulan yang didapat antara lain:

#### **A.1 Implementasi Kebijakan E-Procurement**

Implementasi *E-Procurement* yang dilaksanakan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memberikan hasil positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang dan jasa yang sehat. Hal tersebut dapat terlihat dari perwujudan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam implementasinya. Pada prinsip pertama yaitu akuntabilitas, telah terwujud sistem yang akuntabel dalam pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di Dinas Bina Marga. Hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dari masing-masing dinas agar *E-Procurement* yang dilaksanakan dapat lebih optimal. Prinsip responsivitas dan partisipasi telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Dinas Bina Marga senantiasa melakukan berbagai upaya agar perwujudan *E-Procurement* sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang baik dapat terlaksana. Pada prinsip efisiensi dan efektifitas, telah terlaksana sesuai dengan tujuan *E-Procurement*. Tujuan *E-Procurement* antara lain meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi modern, tercipta optimalisasi anggaran dan waktu dalam proses pengadaan yang dilakukan sehingga terwujudlah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

#### **A.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Procurement.**

Dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan teori Implementasi dari Mazmanian dan Sabatier ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Antara lain keragaman perilaku, kesulitan teknis, kejelasan dan konsistensi tujuan, alokasi sumberdaya, kondisi sosial-ekonomi dan komitmen dan keterampilan implementator.

Dari beberapa faktor tersebut, ada yang pada awalnya menjadi masalah dalam pelaksanaan *E-Procurement* yang dilaksanakan, seperti keragaman perilaku. Dengan penanganan yang baik dari Dinas, kemudian faktor tersebut dapat diatasi. Untuk faktor seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, alokasi sumber daya dan komitmen implementator tidak terdapat masalah apapun karena berjalan sebagaimana mestinya. Sampai sekarang yang masih harus diberikan perhatian khusus adalah pada faktor kesulitan teknis dan kondisi sosial ekonomi. Pada faktor kesulitan teknis, yang menjadi kendala adalah ketidakmampuan dinas untuk

menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan *E-Procurement* agar dapat berjalan dengan optimal. Pada faktor kondisi sosial ekonomi yang menjadi masalah adalah masih terdapat gap yang besar antara daerah kota dengan pedesaan. Hal ini terjadi karena belum terlaksananya penyebaran informasi secara merata sehingga menghambat perwujudan *E-Procurement* yang ideal.

## **B. REKOMENDASI**

1. Diperlukannya berbagai macam bentuk pelatihan bagi para implementator, rekanan juga masyarakat agar memiliki kualifikasi yang baik dibidang teknologi informasi.
2. Diperlukan proses sosialisasi yang merata bagi para implementator, rekanan juga masyarakat. Dengan pemerataan tersebut kemudian diharapkan *E-Procurement* yang dilaksanakan di Dinas Bina Marga dapat berjalan dengan optimal.
3. Diperlukannya kesiapan infrastruktur dan teknis teknologi yang memadai agar implementasi *E-Procurement* di Dinas Bina Marga dapat berjalan dengan baik. Karena perangkat hukum, kelembagaan dan SDM yang memadai saja tidak akan mampu mewujudkan tujuan *E-Procurement* tanpa didukung infrastruktur yang memadai pula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Ihromi, T.O. 1990. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Islamy, M. Irfan. 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakatan VII, Jakarta: Bumi Aksara.

N. Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Komputindo

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Jurnal :**

Sofian Efendi. 2005. Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama. Jurnal. Yogyakarta

### **Peraturan:**

Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik